

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KOTA SERANG
KECAMATAN TAKTAKAN**

Jl. Raya Taktakan Gunung Sari (Takar) Km. 06, Taktakan
Telp. 0254-7009908, Email: taktakankecamatan@gmail.com, Serang-Banten

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T, atas rahmat dan kemurahan-NYA memberikan kemudahan dalam Penyusunan“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Taktakan Tahun 2023” ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Taktakan dibuat pada era Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang, dan diimplementasikan dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 42 Tahun 2011 Tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang. Landasan hukum di atas adalah merupakan dasar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan yang semula perangkat wilayah menjadi perangkat daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Taktakan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi pemerintah serta memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus system akuntabilitas kinerja yang utuh. Laporan Tahunan ini merupakan media bagi Kecamatan Taktakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

Untuk memenuhi kedua fungsi itu, Laporan Tahunan ini pada dasarnya informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2023. Rencana Kinerja (Performance Plan) tahun 2023 pada dasarnya merupakan sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2018-2023, sedangkan Capaian Kinerja (Performance Result) adalah hasil realisasi dari Rencana Kegiatan tersebut.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah

membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami sampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Taktakan, Februari 2023



Mamat Rahmat, S.IP.M.Si
NIP. 19730507 199403 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan urusan kewilayahan merupakan salah satu program pembangunan yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah, dan seiring bergulirnya penyelenggaraan pembangunan dengan pemberian otonomi yang luas kepada daerah dengan maksud untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan potensi daerahnya masing-masing dimana berbagai pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah dari sentralisasi kearah desentralisasi dan berbagai keberhasilan dan kemajuan yang telah dicapai begitu juga dengan munculnya berbagai permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan. Untuk menjawab berbagai perkembangan, permasalahan, kendala dan tantangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah sekarang ini, perlu adanya upaya atau usaha melalui kerja keras dan nyata dalam menata masa depan yang tepat dengan mengambil langkah-langkah strategis dalam melaksanakan pembangunan kedepan.

Menyikapi hal tersebut diatas Pemerintah Kota Serang dalam melaksanakan program pembangunan pada urusan kewilayahan kecamatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk mendukung terselenggaranya pembangunan, Kecamatan Taktakan memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas Kecamatan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan Umum, Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat serta ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dijabarkan melalui program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA), dimana telah termuat visi dan misi yang hendak dicapai melalui arah kebijakan teknis, program dan kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RENJA) Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut yang telah dituangkan baik dalam Rencana Strategis maupun Rencana Kerja Tahunan (RENJA) memanfaatkan segala

sumber daya yang ada baik dana, sarana prasarana maupun sumber daya lainnya yang menunjang terlaksananya penyelenggaraan pembangunan kewilayahan kecamatan serta harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek akuntabilitas kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Taktakan Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Taktakan tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Renstra, selain maksud tersebut diatas juga bermaksud sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kecamatan Taktakan.

1.2 Landasan Hukum

LKjIP Kecamatan Taktakan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. LKjIP Kecamatan Taktakan Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001;

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Serang Tahun 2008-2025 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2021-2040 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Serang nomor 58 tahun 2017 tentang Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Serang;
14. Peraturan Walikota Serang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Serang Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 25);
15. Peraturan Walikota Serang nomor 27 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Serang.

1.3 Gambaran Umum

A. Kondisi Geografis

Kecamatan Taktakan merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kota Serang. Kecamatan Taktakan merupakan salah satu Kecamatan dari enam Kecamatan yang ada di Kota Serang, terletak disebelah timur Kota Serang. Kecamatan Taktakan merupakan wilayah pembangunan bagian timur dari Kota Serang, wilayah pembangunan wilayah timur ini diarahkan dengan fungsi utama adalah Perdagangan, Jasa, Pemerintahan, Fasilitas Sosial, dan Fasilitas Umum.

Dipedalaman Kecamatan Taktakan ada satu tempat yang berpotensi untuk dijadikan sebagai lahan penambahan pendapatan daerah dan sumber perhatian investor-investor asing yaitu tempat penampungan sampah akhir di Kota Serang. Karena sampah-sampah tersebut bisa diolah menjadi kompos dan berguna untuk menyuburkan tanah dan menambah kesuburan tanah untuk perkebunan dan pertanian :

Kecamatan Taktakan memiliki Luas Tanah Wilayah 59,78 Km², Luas Tanah 882.140 Ha² dengan batas-batas Kecamatan sebagai Berikut:

- Utara : Kec Kramat Watu, Kota Serang;
- Selatan : Kec. Pabuaran, Kota Serang;
- Barat : Kec. Waringin Kurung & Gunung Sari Kab. Serang
- Timur : Kec. Serang dan Cipocok Jaya Kota Serang

Secara Administrasi Wilayah Kecamatan Taktakan terbagi 13 Kelurahan, 347 Rukun Tetangga (RT), 115 Rukun Warga (RW) data Tahun 2023 jumlah penduduk Kecamatan Taktakan Laki-laki : 50.868 Jiwa, Perempuan 45.599 dengan total 95.305 Jiwa Pada Tahun 2023. Luas Wilayah Kecamatan Taktakan Sebagai berikut disajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Kelurahan

| NO | KELURAHAN | RT/RW |
|----|---------------|------------|
| 1 | TAKTAKAN | 34 |
| 2 | SAYAR | 47 |
| 3 | PANCUR | 28 |
| 4 | KURANJI | 24 |
| 5 | KALANG ANYAR | 24 |
| 6 | CILOWONG | 34 |
| 7 | PANGGUNG JATI | 34 |
| 8 | DRANGONG | 85 |
| 9 | UMBUL TENGAH | 19 |
| 10 | SEPANG | 73 |
| 11 | LIALANG | 38 |
| 12 | TAMAN BARU | 34 |
| 13 | CIBENDUNG | 19 |
| | TOTAL | 493 |

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Serang melalui Peraturan Walikota Serang Nomor 27 Tahun 2022.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Susunan organisasi Kecamatan Taktakan sebagaimana berikut:

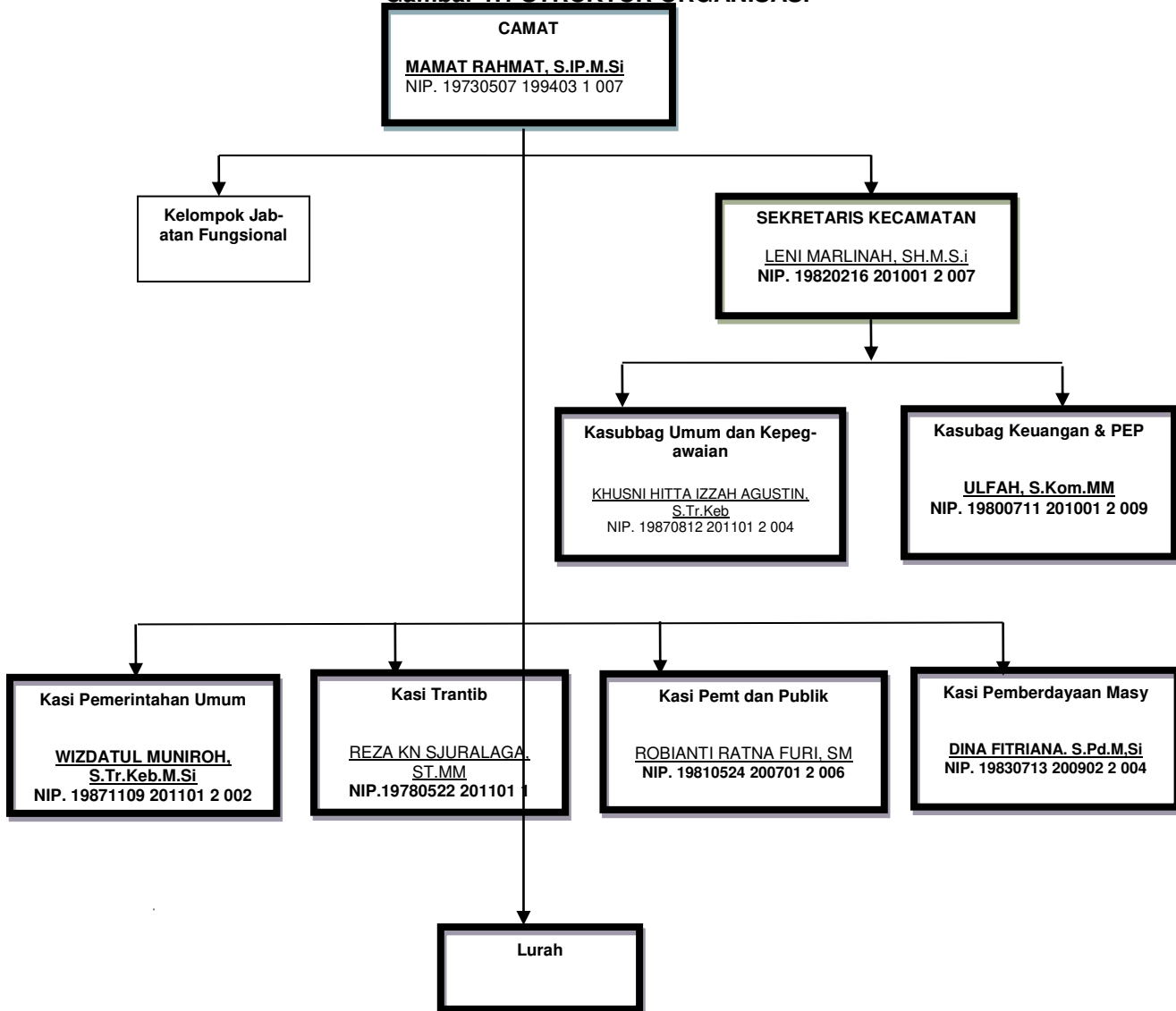
Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemerintahan Umum;
- f. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik; dan
- g. Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri atas :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik; dan
- f. Kelompok Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1 STRUKTUR ORGANISASI



Jumlah Aparatur di Kantor Kecamatan Taktakan adalah 70 orang (8 Orang Aparatur Kecamatan dan 62 Orang Aparatur Kelurahan-kelurahan). Nama dan NIP, Kualifikasi Pendidikan, Golongan, Jabatan Struktural dapat di lihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.2. Daftar Klasifikasi PNS Kecamatan Taktakan

| No | Nama/NIP | Pangkat/Gol | Jabatan | TTD |
|-----------------------------|---|------------------------|---|-----|
| 1 | MAMAT RAHMAT, S.IP.M.Si NIP. 19730507 199403 1 007 | Pembina Tk. I IV/b | Camat | |
| 2 | LENI MARLINAH, SH.M.S.i NIP. 19820216 201001 2 007 | Penata Tk. I III/d | Sekretaris Camat | |
| 3 | ROBIANTI RATNA FURI, SM NIP. 19810524 200701 2 006 | Penata III/c | Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik | |
| 4 | DINA FITRIANA. S.Pd.M,Si NIP. 19830713 200902 2 004 | Penata Tk. I III/d | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan | |
| 5 | WIZDATUL MUNIROH, S.Tr.Keb.M.Si NIP. 19871109 201101 2 002 | Penata III/c | Kasi Pemerintahan Umum | |
| 6 | REZA KN SJURALAGA, ST.MM NIP. 19780522 201101 1 002 | Penata Tk I / III d | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| 7 | KHUSNI HITTA IZZAH AGUSTIN, S.Tr.Keb NIP. 19870812 201101 2 004 | Penata Muda Tk I III/b | Kasubag Umum & Kepegawaian | |
| 8 | ULFAH, S.Kom.MM NIP. 19800711 201001 2 009 | Penata Muda Tk I III/b | Kasubag Keuangan Program Evaluasi dan Pelaporan | |
| KELURAHAN : KURANJI | | | | |
| 9 | SAMSUL FAJAR, S.Pd.I NIP. 19721006 200801 1 003 | Penata Tk. I III/d | Kepala Kelurahan | |
| 10 | SAHRONI,SE NIP. 19750111 200801 1 006 | Penata III/c | Sekretaris Kelurahan | |
| 11 | WIDI HILMA,SE NIP. 19810414 201101 2 002 | Penata III/c | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| 12 | YENI HERLINA, S.KM NIP. 19740512 200112 2 002 | Penata Tk. I III/d | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 13 | WAWAN DARMAWAN, A.Md NIP. 19750423 201101 1 001 | Penata Muda Tk I III/b | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| KELURAHAN : CILOWONG | | | | |
| 14 | HERUJI,S.Pd.i.M.Si | Pembina IV/a | Kepala Kelurahan | |

| | | | | |
|----------------------------------|---|------------------------|---|--|
| | NIP. 19800805 200801 1 012 | | | |
| 15 | AHMAD HAMAMI, SE NIP. 19730305 200003 1 006 | Penata III/c | Sekretaris Kelurahan | |
| 16 | IPAH SATARIYAH, S.Pd NIP. 19700514 200801 2 016 | Penata Tk. I III/d | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| 17 | AAM AMALIAH, S.T NIP. 19751024 201604 2 002 | Penata III/c | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 18 | ROHMAWATI, S.Tr.Keb NIP. 19731005 200502 2 001 | Penata III/c | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| KELURAHAN : TAKTAKAN | | | | |
| 19 | ANIS ROHMAN,SH.I NIP. 19830611 201101 1 001 | Penata Tk. I III/d | Kepala Kelurahan | |
| 20 | RATU LUSI DINAR MARLANA NIP. 19771230 200801 2 007 | Penata Muda Tk I III/b | Sekretars Kelurahan | |
| 21 | WASNI ANISAH, SE NIP. 19801008 200902 2 004 | Penata Muda Tk I III/b | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| 22 | HARYANTO, S.Pd NIP. 19781015 201101 1 001 | Penata Muda Tk I III/b | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| 23 | TRI YULI NINGSIH, S.KM NIP. 19830728 201001 2 015 | Penata Muda Tk I III/b | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| KELURAHAN : LIALANG | | | | |
| 24 | NI'MAT NUGRAHA, SE NIP. 19810113 201101 1 001 | Penata Tk. I III/d | Kepala Kelurahan | |
| 25 | NURUL HADI, S.KM NIP. 19851107 201001 1 006 | Penata Tk. I III/d | Sekretaris Kelurahan | |
| 26 | MULYADI, SE NIP. 19740914 200902 1 002 | Penata Muda Tk I III/b | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 27 | HENNI NOVITA, S.ST NIP. 19771124 200701 2 005 | Penata III/c | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| 28 | Dra. TITING SUMARYATI, S.Pd NIP. 19670810 200701 2 016 | Penata Tk. I III/d | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| KELURAHAN : PANGGUNG JATI | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|---|--|
| 29 | H. JAENURI, SE NIP. 19701010 200906 1 002 | Penata Tk. I III/d | Kepala Kelurahan | |
| 30 | SUHERMAN, SE NIP. 19681201 198903 1 011 | Penata Tk. I III/d | Sekretaris Kelurahan | |
| 31 | HUSNI,SE NIP. 19720505 200012 1 004 | Penata III/c | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| 32 | DIANA , S.ST NIP. 1975 1105 2014 09 2002 | Penata Tk. I III/d | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 33 | DEWI ROHMAYANTI, S.ST NIP. 19820117 201101 2 002 | Penata III/c | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| KELURAHAN : SAYAR | | | | |
| 34 | SANIMAN,S.AP.M.Si NIP. 19700818 200906 1 002 | Penata Tk. I III/d | Kepala Kelurahan | |
| 35 | SETYORINI WAHYU WIJAYANTHI, S.Tr.Keb NIP 19841011 201704 2 001 | Penata Muda Tk I III/b | Sekretaris Kelurahan | |
| 36 | MUTMAINNAH, A.Md.Keb NIP. 19830329 201001 2 010 | Penata III/c | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 37 | DEWI KANIA, S,KM NIP. 19730705 199302 2 003 | Penata Tk. I III/d | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| KELURAHAN : DRANGONG | | | | |
| 38 | H. SLAMET SANTOSA, SE NIP. 19660906 200701 1 027 | Penata Tk. I III/d | Kepala Kelurahan | |
| 39 | HOLID, S.KM NIP. 19771201 201408 1 001 | Penata Muda Tk I III/b | Sekretaris Kelurahan | |
| 40 | MASYITOH,SE NIP. 19810618 200902 2 003 | Penata III/c | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| 41 | NUNUNG NURHAEDAH, S.Pd.M.Pd NIP. 19670601 198803 2 008 | Pembina Tk. I / IV b | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| 42 | EVA DEWI, S.Tr.Keb NIP. 19740401 200701 2 013 | Penata Tk. I III/d | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| KELURAHAN : CIBENDUNG | | | | |
| 43 | MUHTADI, S.AP | Penata Tk. I III/d | Kepala Kelurahan | |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------|--|--|
| | NIP. 19670507 200701 1 038 | | | |
| 44 | YANTI NUR NASYIATUL AISYIYAH, AK NIP. 19860420 200902 2 007 | Penata III/c | Sekretaris Kelurahan | |
| 45 | MERLYANA FISTA, S.STP NIP. 19950212 201708 2 001 | Penata Muda Tk I III/b | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| KELURAHAN : KALANG ANYAR | | | | |
| 46 | MIFTAHUL ARIF, S.Pd.I NIP. 19820123 200902 1 001 | Penata Tk. I III/d | Kepala Kelurahan | |
| 47 | YANI AGUSTIANI, S.Pd NIP. 19870825 201402 2 001 | Penata Tk. I III/d | Sekretaris Kelurahan | |
| 48 | RINA KOMALA, S.KM NIP. 19831231 201001 2 023 | Penata Tk. I III/d | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| 49 | RESHINTA PURNANINGSIH, S.Si NIP. 19790422 201101 2 001 | Penata III/c | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 50 | HADI AHDIYAT, S.Pd NIP. 19790807 200604 1 010 | Penata Tk. I III/d | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| KELURAHAN : TAMAN BARU | | | | |
| 51 | ARIFUDIN, S.Kep.M.A NIP. 19880805 201001 1 002 | Penata III/c | Kepala Kelurahan | |
| 52 | ROBIAHTUL ADAWIYAH, S.Ag NIP. 19760505 200312 2 008 | Penata Tk. I III/d | Sekretaris Kelurahan | |
| 53 | DIAN ROHMAWATI, NIP. 19801217 200312 2 003 | Penata Tk. I III/d | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| 54 | ANITA WULANDARI ANWAR,SH.M.Si NIP. 19831202 201101 2 002 | Penata Tk. I III/d | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 55 | ERNI DWI LESTARI, S.Sos NIP. 19861008 200501 2 003 | Penata III/c | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| KELURAHAN : UMBUL TENGAH | | | | |
| 56 | HIZBULLOH, S.KM.M.Si NIP. 19720827 199403 1 006 | Pembina / IV a | Kepala Kelurahan | |
| 57 | ALI AKBAR,SE NIP. 19810903 200801 1 005 | Penata III/c | Sekretaris Kelurahan | |

| | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|---|--|
| 58 | DEDEH SUMIATI, S.Pd.M.Pd NIP. 1983120202 200902 2 006 | Pembina / IV a | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 59 | HJ. LINA SOFIA, S.KM.M.Si NIP. 19720830201001 2 003 | Penata Tk. I III/d | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| 60 | MAULIDA NURMALA SARI, SKM NIP. 19861114 201001 2 008 | Penata III/c | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| KELURAHAN : PANCUR | | | | |
| 61 | MAHDI, SE NIP. 19720708 199903 1 004 | Penata Tk. I III/d | Kepala Kelurahan | |
| 62 | MUHAMMAD AUNILLAH, S.Pd NIP. 19760921 200801 1 005 | Penata Tk. I III/d | Sekretaris Kelurahan | |
| 63 | ADE FITRIYAH HANDAYANI, S.Pd.SD NIP. 19830710 201402 2 001 | Penata Muda Tk I III/b | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |
| 64 | ABDULLAH, SE NIP. 19670406 200012 1 002 | Penata III/c | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 65 | DIAN YUANA, S.Pd NIP. 19850708 200902 2 007 | Pembina / IV a | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| KELURAHAN : SEPANG | | | | |
| 66 | EKAYANA HENDRIANSYAH, SKM NIP. 19820926 201001 1 013 | Penata III/c | Kepala Kelurahan | |
| 67 | HENDRA AFRIANSYAH, S.Pd NIP. 19810424 200801 1 005 | Penata Tk. I III/d | Sekretaris Kelurahan | |
| 68 | KINTAN DERIANA.A.Md NIP. 19871013 201101 2 005 | Penata Muda III/a | Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | |
| 69 | NOORITA PURWATININGSIH, S.Tr.Keb NIP. 19810718 201704 2 001 | Penata Muda Tk I III/b | Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik | |
| 70 | LUCYANA. A.Ma.S.Pd NIP. 19810320 200801 2 007 | Penata Tk. I III/d | Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | |

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis PD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan PD yang disusun oleh setiap PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Taktakan Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota serang Tahun 2018-2023. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Taktakan Tahun 2018-2023 dengan dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain ada saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Taktakan Tahun 2018-2023 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Taktakan disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Perumusan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mengacu pada kewenangan, tugas dan fungsi kecamatan sesuai dengan nomenklatur terbaru serta memiliki tingkat akuntabilitas penggunaan anggaran yang berorientasi kepada kinerja hasil

dengan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah..

Secara operasional Perubahan Renstra Kecamatan Taktakan Tahun 2018-2023 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023. Namun demikian, saat penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini, Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Taktakan Tahun 2018-2023 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Serang Tahun 2018-2023.

Perencanaan strategis menentukan “diarahkan kemana” suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakterhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

2.1.1 VISI

Adapun Visi yang disepakati dan ditetapkan untuk Kecamatan Taktakan Kota Serang tidak dapat lepas dari ruang lingkup “Visi Pemerintah Kota Serang”, karena seluruh Organisasi Perangkat daerah Kota Serang mengikuti Visi Pemerintah Daerah Kota Serang, Visi adalah suatu pandangan kedepan yang penuh harapan dan cita-cita dan diyakini oleh banyak orang untuk saling bekerjasama dalam mencapai sasaran ataupun tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Visi Pemerintah Daerah Kota Serang :

“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”

KOTA PERADABAN dimaknai sebagai Civil Society yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri :

1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;
2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.
3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;
4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;
5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;
6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;
7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk memublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Dalam melaksanakan mendukung visi tersebut didukung potensi yang ada di Kecamatan Taktakan, yaitu :

POTENSI PERDAGANGAN DAN JASA

Posisi Kecamatan Taktakan yang berdekatan dengan pintu masuk dan keluar Kota Serang menuju Jakarta dan daerah Jawa lainnya, dengan dilintasi jalan nasional merupakan potensi pengembangan kawasan permukiman serta potensi berkembang pesatnya perdagangan, maka Kecamatan Taktakan memiliki kesempatan untuk menjadi titik simpul pertukaran barang dan jasa bagi wilayah-wilayah titik pertumbuhan yang ada di sekitarnya tersebut. Berkembangnya permukiman di Kecamatan Taktakan saat ini merupakan dampak dari perkembangan perekonomian di titik-titik pertumbuhan dimaksud, yang dapat menjadi indikasi potensial bagi tumbuhnya sektor perdagangan dan jasa di masa depan.

POTENSI PERTANIAN

Masih relevan untuk ditawarkan sebagai visi mengingat bahwa transformasi kecamatan yang baik haruslah berjalan secara alamiah sehingga masyarakat pun dapat ikut beradaptasi dan bertransformasi seiring dengan perkembangan kecamatan. Dalam konteks inilah maka mendayagunakan potensi pertanian (dalam arti luas) yang secara alamiah mengkonstruksi karakteristik fisiologis Kecamatan Taktakan adalah sebuah pilihan strategis yang memiliki nilai aksiologis tinggi yang dalam jangka menengah dapat menyelamatkan sebagian besar masyarakat Taktakan yang masih sangat bergantung pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, kehutanan), yang umumnya menjadi kantung-kantung kemiskinan. Kedua, mendayagunakan potensi alamiah yang dimiliki di sektor tersebut guna menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah yang masih banyak terdapat di Kecamatan Taktakan saat ini. Dan Ketiga, dapat menyelamatkan ekologi Kota Serang yang lebih memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dalam konteks ekologis sebagai kondisi alamiahnya ketimbang didayagunakan sebagai kawasan untuk aktivitas ekonomi sektor sekunder. Dengan demikian sejumlah wilayah persawahan produktif dapat diselamatkan dari alih fungsi lahan yang cenderung tak terkendali. Dalam jangka menengah, revitalisasi per-

tanian ini juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan pangan Kota Serang sehingga dapat mengurangi dampak dari fluktuasi ekonomi makro terhadap keterpenuhan kebutuhan primer masyarakat Taktakan. Hal ini juga sejalan dengan nawa cita yang ketujuh yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui upaya memperkuat swasembada pangan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat Kota Serang.

POTENSI BUDAYA

Merupakan manifestasi dari komitmen dan upaya untuk: (1) membina dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam kebudayaan daerah untuk direvitalisasi sebagai jati diri kecamatan dan masyarakat Kecamatan Taktakan, sehingga dapat mewarnai segenap aktivitas dan kehidupan masyarakat sehari-hari, serta mewarnai kehidupan pemerintahan daerah; (2) Memelihara dan mengembangkan potensi seni dan budaya daerah untuk didayagunakan nilai ekonominya bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui peningkatan ekonomi kreatif maupun pengembangan potensi pariwisata alam, seni budaya, dan religi yang telah tumbuh sejak lama.

2.1.2 MISI

Sedangkan Misi adalah sesuatu yang disusun agar dapat melaksanakan Visi yang telah didapatkan. Dengan Misi yang telah ditetapkan maka Pemerintah Daerah dan organisasi tersebut akan terlihat arah dan gerakan dari apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan organisasi tersebut. Isi Misi seyogyanya adalah langkah-langkah ataupun tindakan yang akan dilakukan.

Misi Pemerintah Daerah Kota Serang :

- 1. MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAI KEMANUSIAAN;**

2. **MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN;**
3. **MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING; dan**
4. **MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK.**

Oleh karenanya Kecamatan Taktakan Kota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang **“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA”** : Pada MISI KEEMPAT (4) yaitu : **“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK “**

2.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 menyebutkan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi umum untuk pencapaian visi dan misi Kecamatan Taktakan adalah :

1. Meningkatkan tugas dan fungsi Kelurahan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan fungsi pelayanan umum, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Memacu meningkatnya kualitas sumber daya manusia, baik aparatur maupun masyarakat terutama melalui aspek pendidikan dan kesehatan dalam rangka peningkatan peran aktif masyarakat dan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparatur.
3. Memacu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan industri kecil (home industri).

4. Menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban untuk menjamin stabilitas yang kondusif dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Taktakan tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Serang, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kota Serang 2018-2023 kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Taktakan adalah :

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.
2. Peningkatan Akuntabilitas, profesional, dan bermotivasi tinggi Aparatur Kecamatan.
3. Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan kepada Masyarakat.
4. Peningkatan pemberdayaan usaha kelompok masyarakat dan lembaga ekonomi.
5. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
6. Peningkatan operasi penegakan Peraturan Daerah
7. Peningkatan pemantauan terhadap daerah rawan konflik maupun rawan bencana.

2.3 PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Taktakan

| TUJUAN STRATEGIS | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|---|--|--|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada tingkat kecamatan | | Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Taktakan | Nilai | 82,17 |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat kecamatan | Hasil evaluasi LKjIP | Nilai | 65,75 |

Perjanjian kinerja memuat target-target yang sudah dimuat dalam PK (penetapan Kinerja) dan penjelasannya apakah ada perbedaan antara Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK). Kaitannya perjanjian kinerja yang tertuang dalam satu Perencanaan kinerja, dimana perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan perwujudan dari Misi ke empat Kecamatan Taktakan Kota Serang maka ditetapkan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2022 sebagai berikut :

2.2 Tabel Program Kegiatan dan Pagu Anggaran Tahun 2023

| KECAMATAN TAKTAKAN | | 21.257.712.631 |
|--------------------|--|-----------------------|
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.002.120.166 |
| I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 141.998.000 |
| | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 113.568.000 |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.820.000 |
| | -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.820.000 |
| | -Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.020.000 |
| | -Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 5.820.000 |
| | -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.950.000 |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.747.369.460 |
| | -Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.700.419.460 |
| | -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 21.000.000 |
| | -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 25.950.000 |
| III | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 26.450.000 |

| | | |
|-------------|---|--------------------|
| | -Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 26.450.000 |
| IV | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 76.500.000 |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya | 76.500.000 |
| V | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 645.265.967 |
| | -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.786.627 |
| 0 | -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 138.151.301 |
| | -Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga | 56.695.008 |
| | -Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 52.240.000 |
| | -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 72.653.613 |
| | -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 48.529.418 |
| | -Fasilitasi Kunjungan Tamu | 93.040.000 |
| | -Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 161.170.000 |
| VI | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 83.565.825 |
| | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.544.637 |
| | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 44.021.188 |
| VII | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 794.234.114 |
| | -Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 45.020.000 |
| | -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 359.709.314 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 389.504.800 |
| VIII | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 486.736.800 |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 295.784.800 |
| | -Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 180.952.000 |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 |
| B | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 927.979.000 |
| IX | -Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 55.325.000 |
| | -Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 55.325.000 |
| X | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 872.654.000 |
| | -Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 872.654.000 |
| C | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 7.012.805.465 |
| XI | Pemberdayaan Kelurahan | 6.818.293.465 |
| | - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 167.972.409 |
| | - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1.450.461.056 |
| | - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5.199.860.000 |
| XII | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 194.512.000 |
| | - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 30.170.000 |
| | - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 164.342.000 |
| D | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 314.808.000 |
| XIII | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 314.808.000 |
| | - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan | 86.523.000 |
| | - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya | 181.785.000 |
| | - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 46.500.000 |

2.4 RENCANA AKSI PELAKSANAAN KINERJA

Rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2023 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/ kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2023, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja.

Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/ hambatan yang timbul.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Kecamatan Taktakan tahun 2023, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan media untuk menguraikan hasil pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keberhasilan, kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi, serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil oleh Kecamatan Taktakan untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Taktakan dimasa yang akan datang. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja didefinisikan sebagai ukuran keberhasilan (baik kuantitatif maupun kualitatif) yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah sasaran telah tercapai. Karena itu, pencapaian sasaran Kecamatan Taktakan dapat dilakukan dengan menilai seberapa jauh Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran telah tercapai. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasarnya telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel berikut :

3.1 PENCAPAIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023

| N O | URUSAN PEMERIN TAHAN | PERAN GKAT DAERA H PELAKS ANA | KEBIJA KAN | URAIAN PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN | INDIKAT OR KINERJA PROGRA M/ KEGIATA N/ SUB KEGIATA N | SATUAN | TAR GET 2023 | REALISA SI TAHUN 2023 | TINGK AT CAPAI AN TAHU N 2023 | PERMASA LAHAN | UPAYA MENGATA SI PERMASA LAHAN | TINDAK LANJUT REKOME NDASI DPRD |
|--------|----------------------------|--|---------------|---|--|---------|--------------------|--------------------------------|---|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | $10=9/8$ *100 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Kewilayah an | Taktak an | | | | | | | | | | |
| | | | | POGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Tingkat Kepuasan Pelayanan Kesekretiatan | % | 100 | 90 | 90 | | | |
| | | | | Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 8 | 66,36 | 829,50 | | | |
| | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 1 | 1 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|---|---|-----|--|--|--|
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi | Laporan | 3 | 3 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|-------------|-----|-----|-------|--|--|--|
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Ketersediaan Dokumen Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Dokumen | 5 | 5 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bulan | 68 | 68 | 100 | | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | 12 | 1.200 | | | |
| | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Laporan | 4 | 2 | 50 | | | |
| | | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase dokumen administrasi barang milik daerah yang terselesaikan | % | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase kehadiran pegawai Kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah stel pakaian dinas beserta perlengkapannya | Steel | 510 | 510 | 100 | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prsarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor | Unit | 65 | 61 | 94 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Meyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan | Unit | 10 | 10 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | Pajaknya | | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 11 | 11 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 1 | 0 | 0 | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Kelurahan Taktakan | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|---------|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | | #DIV/0! | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prsarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | 1 | #DIV/0! | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Taktakan | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|---------|--|--|--|
| | | | | | Daerah | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | #DIV/0! | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Taktakan | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----|-----|------------|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Sayar | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sayar | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | 0 | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sayar | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Pancur | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan | % | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | administrasi umum Perangkat Daerah | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------|----|----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prsarana kantor dalam kondisi baik | % | | 0 | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Pancur | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Pancur | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Kuranji | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|----|----|-----|--|--|--|
| | | | | | Disediakan | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prsarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kuranji | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kuranji | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Kalanganyar | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|----|----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungi Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kalanganyar | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Kalanganyar | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | 0 | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Cilowong | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungi Tamu | Laporan | | | | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Cilowong | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | Menyurat | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Cilowong | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 1 | 50 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 0 | | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang | Unit | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|----------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | Dipelihara/Direhabilitasi | | | | | | | | |
| | | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Panggungjati | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Pangungjati | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| | | | | Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | | |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Panggungjati | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | | |
| | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | 1 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Drangong | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Fasilitas Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungi Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 1 | 0 | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Drangong | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | yang Disediakan | | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Drangong | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Umbul Tengah | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|----|----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak danPenggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | | | | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | SKPD | | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prsarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Umbul Tengah | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Umbul Tengah | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang | % | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | | Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Sepang | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|----------|----|----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sepang | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | | 0 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 1 | 8 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Sepang | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Lialang | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|----|----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | | 0 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungi Tamu | Laporan | | | | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Lialang | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Lialang | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|-------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Taman Baru | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | Dokumen | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | | | | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Taman Baru | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|----------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | Menyurat | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Taman Baru | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung | Unit | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| | | | | | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | | | | | | |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah Cibendung | Persentase tingkat ketersediaan pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | | |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Listrik/Penerangan Disediakan Komponen Instalasi Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 12 | 12 | 100 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | | | | | | |
| | | | | Fasilitasi Kunjungi Tamu | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik | % | | | | | | |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Cibendung | Persentase cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Laporan | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | | | | | | |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kelurahan Cibendung | Persentase cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Unit | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Cakupan pelayanan PATEN Tepat Waktu dan capaian realisasi distribusi SPPT | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase Terselenggara nya Fasilitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/Sine rgi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Laporan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Laporan | | | | | | |
| | | | | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Presentase Sarana dan prasaran pelayanan umum terpelihara | % | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|------------------------|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | Dokumen | | | | | | |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Laporan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Presentase kategori kelurahan berkembang | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Taktakan | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 1 | 8 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Sayar | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 5 | 42 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Pancur | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Kuranji | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Kalanganyar | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 1 | 8 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Cilowong | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | Kelurahan yang Terbangun | | | | | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Pangungjati | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Drangong | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | | Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | | | | | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Umbul Tengah | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Sepang | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------------------------|------------|------------|------------|--|--|--|
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Kelurahan Lialang | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|----------|------------|------------|------------|--|--|
| | | | | | Kelurahan | | | | | | | |
| | | | | | Pemberdayaan Kelurahan Taman Baru | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | | Pemberdayaan Kelurahan Cibendung | Capaian pemberdayaan kelurahan | % | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Lembaga Kemasyarakatan | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah Sarana dan Prasarana | Unit | 1 | 1 | 100 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------------------------|-----|-----|---------|--|--|--|
| | | | | | Kelurahan yang Terbangun | | | | | | | |
| | | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Pokmas/Ormas | 12 | 12 | 100 | | | |
| | | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | Presentase terselenggara ya pemberdayaan kegiatan di tingkat Kecamatan | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | Lembaga Kemasyarakatan | 2 | 2 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya | Lembaga Kemasyarakatan | 70 | 70 | 100 | | | |
| | | | | Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat | Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat | Usaha | | | #DIV/0! | | | |
| | | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Cakupan Persentase Terselenggara nya Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum | % | 100 | 100 | 100 | | | |
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah Event Urusan Pemerintahan Umum | Event | 5 | 4 | 80 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|-------|---|---|-----|--|--|--|
| | | | | <p>Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelastrian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> | <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> | orang | 1 | 1 | 100 | | | |
| | | | | <p>Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Ragonal dan Nasional</p> | <p>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan</p> | orang | 4 | 3 | 75 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------|----|----|-----|--|--|--|--|
| | | | | | Lokal, Regional, dan Nasional | | | | | | | | |
| | | | | Pelaksanaan Tugas Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | dokumen | 12 | 12 | 100 | | | | |

3.2 TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TAKTAKAN TAHUN 2023

| INDIKATOR KINERJA | CARA FORMULA PENGUKURAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CA-PAIAN | KINERJA PELAYANAN |
|--|---|--------|--------|-----------|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Taktakan | Nilai rata-rata dari aspek pencapaian, aspek kualitas dokumen dan aspek inovasi | Nilai | 80 | 80.47 | 107,48 | sangat tinggi |
| Hasil evaluasi LKjIP | Nilai Pelaporan kinerja yang dievaluasi oleh Inspektorat | Nilai | 50 | 65.75 | 132,52 | sangat tinggi |

3.1.1 Pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Taktakan Tahun 2023

Sejak tahun 2022 indikator sasaran Capaian Kelurahan yang memenuhi standard kelurahan (berkembang) tidak menjadi indikator sasaran perangkat daerah. Hal ini dikarenakan ada perubahan nomenklatur mengacu pada Permendagri nomor 090 tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sehingga perlu penyesuaian dalam menentukan baik indikator sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan. Untuk indikator Capaian Kelurahan yang memenuhi standard kelurahan (berkembang) dialihkan menjadi indikator program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan pertimbangan pada program ini meliputi semua aspek dalam pencapaian indikator tersebut baik dari segi perencanaan dengan adanya musrenbang, pembangunan infrastruktur kelurahan hingga peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam segala aspek.

Rata-rata capaian indikator pada tahun 2022 adalah sebesar 117,52% dengan target kinerja dari 2 indikator sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai melampaui batas yang ditargetkan, yaitu :

a. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Taktakan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang pada tahun 2022 melakukan kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang meliputi pelayanan pada Kecamatan Taktakan yang memiliki objek survey pelayanan PATEN. Berdasarkan hasil kajian BAPPEDA Kota Serang yang bekerjasama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa indeks kepuasan pelayanan pada Kecamatan Taktakan tahun 2022 adalah sebesar 85,98 yang berarti melebihi target yang direncanakan pada dokumen perencanaan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di PATEN Taktakan dapat dipertahankan pada kategori mutu pelayanan B. Capaian ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 sebesar 82,01.

Peningkatan hasil survey kepuasan masyarakat tidak lepas dari komitmen pimpinan bersama para lurah untuk terus berupaya dalam melaksanakan pelayanan prima terhadap masyarakat. Selain melengkapi sarana dan prasarana pelayanan akan tetapi dengan melakukan evaluasi secara berkala dan memonitoring berjalannya pelayanan.



Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Mengaktifkan masyarakat untuk mau berpartisipasi menjadi responden dalam mengisi survey kepuasan masyarakat secara online yang disediakan oleh BAPPEDA.

2. Telah dilakukan peningkatan sarana prasarana pelayanan terhadap masyarakat yaitu Ruang Bermain Anak, Ruang Laktasi, fasilitas kursi roda untuk disabilitas, petunjuk parkir kendaraan dan titik kumpul bencana, toilet khusus masyarakat dan washtuffle di pintu masuk ruang pelayanan.
3. Melengkapi sarana dan prasarana pendingin ruangan dan alat pemadam kebakaran untuk memfasilitasi ruang pelayanan PATEN yang sebelumnya belum tersedia.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala dalam petugas pelayanan dalam melaksanakan pelayanan dan selalu berpartisipasi dalam program yang diselenggarakan oleh OPD terkait seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang pada tahun 2022 memberlakukan pelayanan pembuatan data kependudukan secara kolektif oleh Operator SIAK yang ada di Kecamatan. Sehingga masyarakat tidak perlu pergi jauh ke kantor DISDUKCAPIL secara langsung akan tetapi cukup ke kecamatan.

Apabila mengacu pada table IKM PATEN di atas maka upaya yang akan dilakukan pada tahun 2023 dalam meningkatkan pelayanan kecamatan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi responden dalam mengisi survey kepuasan masyarakat secara online yang disediakan oleh BAPPEDA.
- Menyediakan sarana pengaduan pada setiap pelayanan Kecamatan dan Kelurahan secara online dan offline
- Meningkatkan kebersihan toilet bagi tamu pelayanan
- Mengefektifkan larangan merokok pada ruangan pelayanan
- Berkoordinasi dengan instansi terkait pelayanan public yang melibatkan unsur kecamatan dan kelurahan dalam hal pelayanan secara online
- Meskipun wabah covid-19 telah mereda tapi protocol kesehatan harus tetap diterapkan

b. Hasil evaluasi LKjIP

Evaluasi dokumen LKjIP dilaksanakan pada awal tahun 2024 yang merupakan laporan capaian kinerja tahun 2023. Evaluasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Serang menerangkan bahwa Kecamatan Taktakan mendapatkan skor 65.75 dengan predikat B = Baik dari skor yang ditargetkan sebesar 50. Sehingga persentase capaian kinerjanya ada pada angka 132,52%. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi. Bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2021 dengan skor 61,17, LKjIP tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dengan skor 65.75 sehingga rata-rata kenaikannya adalah 4.58%.

Meningkatnya skor hasil reviu Inspektorat merupakan bukti nyata kinerja OPD kecamatan Taktakan dalam berupaya untuk mensukseskan visi misi Kepala Daerah. Hal ini dicapai tidak lepas dari koordinasi dan konsultasi dengan OPD teknis dalam hal ini Bagian Organisasi dan RB Setda Kota Serang serta Inspektorat selaku tim yang mereviu dokumen LKjIP Kecamatan Taktakan.

Sesuai hasil rekomendasi dari tim riviui dokumen LKjIP Kecamatan Taktakan berikut adalah perbaikan-perbaikan yang telah dilaksanakan :

1. Monitoring pelaksanaan rencana aksi
2. Membuat SOP yang baku mekanisme pengumpulan data capaian kinerja dalam penyusunan LKjIP
3. Hasil Pengukuran Kinerja dijadikan dasar pemberian reward dan punishment
4. Menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaporan kinerja
5. Pencapaian target kinerja sasaran dalam rencana kerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran
6. Menyajikan informasi terkait penyebab, hambatan, permasalahan atas keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan dalam laporan kinerja

3.3 TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TAKTAKAN TAHUN 2018 s.d 2022

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | REALISASI KINERJA TAHUN 2023 | REALISASI KINERJA PERTAHUN | | | | | CAPAIAN KINERJA (%) | | | | |
|--|--------|------------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|------|---------------------|--------|--------|-------|------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Taktakan | Nilai | 84.17 | 82.01 | 77.44 | 72.14 | 70.00 | 0 | 106.51 | 103.25 | 144.28 | 96.00 | 0 |
| Hasil evaluasi LKjIP | Nilai | 65.75 | 66.26 | 51.25 | 40.28 | 33.65 | 0 | 138.04 | 111.41 | 100.70 | 85.00 | 0 |

**3.4 TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KECAMATAN TAKTAKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH**

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET KONDISI AKHIR RPJM | TARGET KINERJA | | | | | REALISASI KINERJA | | | | | CAPAIAN KINERJA (%) | | | | | DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RPJM |
|--|--------|---------------------------|----------------|------|------|------|------|-------------------|-------|-------|-------|------|---------------------|--------|--------|--------|------|---------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 19 |
| Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Taktakan | Nilai | 82.17 | 50 | 75 | 77 | 80 | 82 | 72.14 | 77.44 | 82.01 | 85.98 | 0 | 144.28 | 103.25 | 106.51 | 107.48 | 0 | 104.85 |
| Hasil evaluasi LKjIP | Nilai | 65.75 | 40 | 46 | 48 | 50 | 67 | 40.28 | 51.25 | 66.26 | 66.26 | 0 | 100.70 | 111.41 | 138.04 | 132.52 | 0 | 98.90 |

Pada Pengukuran Kinerja ini dilakukan juga pengukuran pada kinerja kegiatan dengan membandingkan target, realisasi dan capaian pada tahun dasar hingga tahun 2022 agar dapat diketahui capaian kinerja kegiatan pada masing-masing tahun dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada misi perangkat daerah. Dan untuk mengetahui kemajuan kinerja kecamatan Taktakan tahun 2023 atas perbandingan kinerja kecamatan dengan kondisi akhir RENSTRA Kecamatan. Selanjutnya perbandingan capaian kinerja hingga tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi akhir Perubahan Kedua RENSTRA Kecamatan Taktakan adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Taktakan tercapai melebihi target yang direncanakan pada kondisi akhir Renstra tahun 2023 yaitu target capaian dengan nilai 82 telah tercapai pada tahun 2023 dengan nilai 80.47 sehingga persentasi mencapai 104.85%
- b. Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ditarget dengan nilai 67 pada tahun akhir Renstra 2023, sedangkan LKjIP tahun 2022 telah mencapai nilai 65.75 sehingga target persentasi mencapai 98,90%.

3.5 Tabel Program dan Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Taktakan tahun 2023

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) CAPAIAN | KINERJA PELAYANAN |
|----|--|--|--|--|--------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan Taktakan | | | | Nilai | 80 | 85.98 | 107.48 | sangat tinggi |
| 2 | Hasil evaluasi LKjIP | | | | Nilai | 50 | 65.75 | 132.52 | sangat tinggi |
| | | Program Penunjang Urusan pemerintah Daerah | | Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan | % | 90 | 90 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | jml | 14 | 14 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Kecamatan | jml | 2 | 2 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Kecamatan | % | 2 | 2 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase kehadiran pegawai Kecamatan | % | 100 | 100 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah pelayanan administrasi umum | bln | 12 | 12 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | jml | 100 | 100 | 100.00 | sangat tinggi |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) CAPAIAN | KINERJA PELAYANAN |
|----|-------------------------|---|---|--|---------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | cakupan ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | bln | 12 | 12 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah cakupan pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | unit | 100 | 100 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | persentase PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI SOP/SP/KETENTUAN | % | 95 | 95 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Capaian Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan | % | 100 | 100 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Capaian Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | % | 100 | 100 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | persentase kategori kelurahan berkembang | % | 60 | 60 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Capaian Pemberdayaan Kelurahan | % | 80 | 80 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | capaian Lembaga Kemasyarakatan yang terbina | lembaga | 1 | 1 | 100.00 | sangat tinggi |

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | (%) CAPAIAN | KINERJA PELAYANAN |
|----|-------------------------|---|---|---|--------|--------|-----------|-------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | PROGRAM KOORDINASI KE-TENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | Capaian penanganan k3 | % | 70 | 70 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Capaian Laporan pelanggaran PERDA | % | 100 | 100 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | Cakupan Persentase Terselenggaranya Fasilitasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | % | 85 | 85 | 100.00 | sangat tinggi |
| | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penu-gasan Kepala Daerah | capaian penyelenggaraan event urusan pemerintahan umum | % | 85 | 85 | 100.00 | sangat tinggi |

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini merupakan penunjang kesekretariatan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Program ini terdiri dari kegiatan perencanaan pelaporan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah, pemeliharaan dan pengadaan barang milik daerah. Secara umum capaian indikator kinerja program ini adalah 90%.

Output subkegiatan yang tercapai pada program ini sebagai berikut :

| NO | NAMA KEGIATAN | OUTPUT | SATUAN | CAPAIAN | KETERANGAN |
|----|---|-------------------------------|---------|---------|--|
| 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | dokumen perencanaan | dokumen | 14 | Renstra Perubahan, PK Murni, PK Perubahan, RENJA Murni, Renja Perubahan, RKA Murni, RKA Pergeseran, DPA Murni, DPA Pergeseran, Dok Penilaian Risiko, Renja RB, LKJIP, LPPD, LKPJ |
| 2 | Administrasi Keuangan | dokumen laporan keuangan | dokumen | 3 | Laporan Keuangan Unaudited, Laporan Keuangan Audited, Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Bulanan |
| 3 | Administrasi Kepegawaian | Pakaian Dinas beserta atribut | Stell | 510 | Belanja Pakaian Baju Kader |
| 4 | Administrasi BMD | Laporan BMD | dokumen | 1 | Belanja Modal dan Persediaan Barang Pakai Habis Kecamatan dan 13 Kelurahan |
| 5 | Administrasi Umum | pelayanan kesekretariatan | bulan | 12 | |
| 6 | Pemeliharaan BMD | kendaraan yang dipelihara | unit | 11 | kendaraan roda dua dan kendaraan roda 4 di kecamatan dan 13 kelurahan |
| 7 | Pengadaan BMD | gedung yang dibangun | unit | 55 | Belanja Peralatan Kantor |

Keberhasilan : Tersusunnya dokumen yang bahkan tidak termasuk ke dalam target kegiatan pada DPA atau tidak teranggarkan seperti Dokumen Penilaian Risiko dan Dokumen Reformasi Birokrasi

Hambatan : Beban kerja yang melebihi kapasitas SDM eselon IV untuk mengelola kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan bisa di lihat dari capaian dokumen yang mencapai 14 dokumen dalam satu tahun anggaran

Saran : Menyampaikan usulan kepada pimpinan untuk melakukan pemisahan tupoksi antara Kasubag Keuangan dan PEP.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program ini terdiri dari dua kegiatan dan 2 sub kegiatan sebagai media untuk menunjang kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Capaian indikator kinerja program ini adalah persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sesuai sop/sp/ketentuan sebesar 80% dengan serapan anggaran 99,88%. Output subkegiatan yang termasuk dalam program ini adalah dokumen musrenbang, partisipasi dalam lomba kelurahan dan distribusi SPPT PBB kepada Wajib Pajak yang memiliki tanah dan bangunan di Wilayah Kecamatan Taktakan.

- Keberhasilan : Kecamatan Taktakan mendapatkan reward dari Pemerintah Kota sebagai kecamatan dengan realisasi PBB pada tahun 2023
- Hambatan : Kurangnya pemahaman dan motivasi bagi aparatur kelurahan dalam mengikuti ajang lomba kelurahan
- Saran : Memberikan reward kepada kelurahan yang berprestasi

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program ini merupakan penunjang dalam rangka memberdayakan perempuan dan masyarakat di Lingkungan Kecamatan Taktakan dengan indikator kinerja Capaian Kelurahan yang memenuhi standard kelurahan (berkembang). Formulasi perhitungan capaian berdasarkan hasil Laporan Data Evaluasi Perkembangan Kelurahan tahun 2023 melalui aplikasi online milik Kemendagri dengan link <http://epdeskel.kemendagri.go.id>. Dari 13 (empat belas) kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Taktakan, hingga laporan ini disusun sebanyak 11 (sebelas) kelurahan telah selesai melakukan penginputan data pada aplikasi tersebut.

3.6 Tabel Hasil Laporan EPDESKEL tahun 2023

| No | Nama Kelurahan | Bid. Pemerintahan | Bid. Kewilayahan | Bid. Kemasyarakatan | Nilai | Tingkat Perkembangan |
|----|----------------|-------------------|------------------|---------------------|-------|----------------------|
| 1 | Taktakan | 101 | 65 | 162 | 328 | Berkembang |
| 2 | Sayar | 104 | 76 | 166 | 346 | Berkembang |
| 3 | Pancur | 106 | 73 | 190 | 369 | Cepat Berkembang |
| 4 | Kuranji | 111 | 89 | 173 | 373 | Cepat Berkembang |
| 5 | Kalang Anyar | 98 | 65 | 158 | 321 | Berkembang |
| 6 | Cilowong | 109 | 75 | 159 | 343 | Berkembang |
| 7 | Panggungjati | 112 | 87 | 176 | 375 | Cepat Berkembang |
| 8 | Drangong | 110 | 73 | 173 | 356 | Cepat Berkembang |
| 9 | Umbul Tengah | 107 | 79 | 178 | 364 | Cepat Berkembang |
| 10 | Sepang | 109 | 65 | 182 | 356 | Cepat Berkembang |
| 11 | Lialang | 99 | 49 | 156 | 304 | Berkembang |
| 12 | Taman Baru | 107 | 65 | 177 | 349 | Berkembang |
| 13 | Cibendung | 95 | 58 | 152 | 305 | Berkembang |

Kelurahan Berkembang berjumlah 7 kelurahan yaitu :

1. Taktakan
2. Sayar
3. Kalang Anyar
4. Cilowong
5. Lialang
6. Taman Baru
7. Cibendung

Kelurahan Cepat Berkembang 6 kelurahan yaitu :

1. Pancur
2. Kuranji
3. Panggung Jati
4. Drangong
5. Umbul Tengah

6. Sepang

Sehingga hitungan formulasi capaian indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kelurahan dengan status cepat berkembang}}{\text{Jumlah seluruh Kelurahan}} \times 100\%$$

Dengan hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \frac{6}{13} \times 100\% \\ & = 46,13\% \end{aligned}$$

Capaian kelurahan dengan status cepat berkembang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 30,76% menjadi 46,13%.

Selain keberhasilan dalam capaian status Kelurahan Cepat Berkembang, pada program ini Kecamatan Taktakan berhasil meraih capaian indikator lainnya yaitu :

- a. Juara Umum dengan paling banyak meraih juara dalam event Lomba Kampung Resik lan Aman tingkat Kota Serang (Kelurahan Sepang)
- b. Juara Harapan 3 Lomba Inovasi PLAKAT

Capaian Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

3.7. Tabel Lokus Sarpras Kelurahan

| No | Nama Kelurahan | Spek Pekerjaan | Lokasi | jumlah anggaran |
|----|----------------|--|-----------------------------|-----------------|
| 1 | Taktakan | Belanja Modal Pembangunan Paving Block | Link Cigabus dalem RT 01/09 | 53.500.000 |
| 2 | Sayar | Belanja Modal Pembangunan Paving Block | Kp Cikentang RT 05 RW 02 | 60.000.000 |
| 3 | Pancur | Belanja Modal Pembangunan Drainase | Kp Pancur Melati RW 05 | 30.800.000 |
| 4 | Kuranji | Belanja Modal Pembangunan Drainase | Link Kuranji Jalan RW 01 | 77.000.000 |
| 5 | Kalang Anyar | Belanja Modal Pembangunan Paving Block | Kp Pekijing RT 007/008 | 59.675.000 |
| 6 | Cilowong | Belanja Modal Pembangunan Drainase | Jakung Pasar RT 15/RW 02 | 48.125.000 |
| 7 | Drangon | Belanja Modal Pembangunan Drainase | Link Long Jaha RT 01/016 | 57.750.000 |
| 8 | Umbul Tengah | Belanja Modal Pembangunan Paving Block | Kp Umbul Tengah Rt 04/04 | 52.000.000 |
| 9 | Sepang | Belanja Modal Pembangunan Paving Block | Link Sepang | 50.000.000 |
| 10 | Lialang | Belanja Modal Pembangunan Paving Block | Link Gurugui RT 01/01 | 50.000.000 |
| 11 | Taman Baru | Belanja Modal Pembangunan Paving Block | Link Taman Baru RT 014/005 | 60.000.000 |
| 12 | Cilowong | Belanja Modal Pembangunan Paving Block | Perng Masjid RW 05 | 60.000.000 |
| | J U M L A H | | | 658.850.000 |

4) **Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**

Program ini koordinasi dengan aparat teknis dalam penegakan PERDA dilingkungan Kecamatan dengan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan APH baik tingkat kecamatan maupun tingkat Kota terkait penegakan PERDA dan undang-undang yang menyangkut ketertiban dan ketentraman masyarakat serta secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi.

5) **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**

Turunan dari Program ini yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang terdiri dari 3 subkegiatan yang memfasilitasi penyelenggaraan PHBI dan PHBN tingkat kecamatan sebagai partisipan dalam PHBI PHBN tingkat kota. Serta untuk fasilitasi Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

Pada pelaksanaan Perayaan Hari Besar Islam yaitu event MTQ tingkat Kota Serang, Kecamatan Taktakan meraih juara ke 2.

B. REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Taktakan Tahun Anggaran 2023 memuat lima program dan 170 (seratus empat puluh) kegiatan serta 240 subkegiatan dengan poin-poin penjelasan sebagai berikut :

1. Anggaran Murni : Rp. 20.596.103.798,-
Penambahan anggaran : Rp. 661.608.833,-
Anggaran Perubahan : Rp. 21.257.712.631,-
2. Realisasi anggaran Belanja total sebesar Rp. 20.229.122.996,- atau 95.16%
saldo pagu anggaran sebesar Rp. 1.028.589.635,- atau 4.84%
3. Beberapa point penting pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

| No | URAIAN | KETERANGAN |
|----|---|---|
| 1 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Rp. 7.012.805.465,- | Realisasi 96% Rp 6.754.499.630,- |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Rp. 13.002.120.166 | Realisasi 94.39% Rp 12.272.639.366,- |
| 3 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Rp. 927.979.000 | Realisasi 99.88% Rp 926.879.000,- |
| 4 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Rp. 314.808.000 | Realisasi 87.39% Rp 275.105.000,- |

3.6 PENCAPAIAN REALISASI ANGGARAN KECAMATAN TAKTAKAN TAHUN 2023

| No. | Uraian | PAGU ANGGARAN | KONDISI S/D BULAN INI (%) | | | SELISIH (%) | SISA ANGGARAN | (%) | Ket |
|----------|---|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------|--------------|-----|
| | | | REALISASI | | | | | | |
| | | | Rp | FISIK (%) | KEUANGAN (%) | | | | |
| | BELANJA | 21.257.712.631 | | | | | | | |
| | BELANJA LANGSUNG | 21.257.712.631 | 20.229.122.996,00 | 95,16 | 95,16 | (94,21) | 1.028.589.635,00 | 4,84 | |
| | KECAMATAN TAKTAKAN | 21.257.712.631 | 20.229.122.996,00 | 95,16 | 95,16 | (94,21) | 1.028.589.635,00 | 4,84 | |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13.002.120.166 | 12.272.639.366,00 | 94,39 | 94,39 | (93,45) | 729.480.800 | 5,61 | |
| I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 141.998.000 | 101.378.000 | 71,39 | 71,39 | (70,68) | 40.620.000 | 28,61 | |
| | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 113.568.000 | 81.328.000 | 71,61 | 71,61 | (70,90) | 32.240.000 | 28,39 | |
| | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 5.820.000 | 640.000 | 11,00 | 11,00 | (10,89) | 5.180.000 | 89,00 | |
| | -Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 5.820.000 | 5.820.000 | 100,00 | 100,00 | (99,00) | - | - | |
| | -Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 9.020.000 | 5.820.000 | 64,52 | 64,52 | (63,88) | 3.200.000 | 35,48 | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--|
| | -Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 5.820.000 | 5.820.000 | 100,00 | 100,00 | (99,00) | - | - | |
| | -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.950.000 | 1.950.000 | 100,00 | 100,00 | (99,00) | - | - | |
| II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10.747.369.460 | 10.520.165.104 | 97,89 | 97,89 | (96,91) | 227.204.356 | 2,11 | |
| | -Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10.700.419.460 | 10.475.165.104 | 97,89 | 97,89 | (96,92) | 225.254.356 | 2,11 | |
| | -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 21.000.000 | 21.000.000 | 100,00 | 100,00 | (99,00) | - | - | |
| | -Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 25.950.000 | 24.000.000 | 92,49 | 92,49 | (91,56) | 1.950.000 | 7,51 | |
| III | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 26.450.000 | 21.825.000 | 82,51 | 82,51 | (81,69) | 4.625.000 | 17,49 | |
| | -Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 26.450.000 | 21.825.000 | 82,51 | 82,51 | (81,69) | 4.625.000 | 17,49 | |
| IV | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 76.500.000 | 76.500.000 | 100,00 | 100,00 | (99,00) | - | - | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapannya | 76.500.000 | 76.500.000 | 100,00 | 100,00 | (99,00) | - | - | |
| V | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 645.265.967 | 519.459.830 | 80,50 | 80,50 | (79,70) | 125.806.137 | 19,50 | |
| | -Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 22.786.627 | 17.877.852 | 78,46 | 78,46 | (77,67) | 4.908.775 | 21,54 | |
| 0 | -Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--|
| | Kantor | 138.151.30 1 | 130.327.147 | 94,34 | 94,34 | (93,39) | 7.824.154 | 5,66 | |
| | -Penyediaan Peralatan dan Rumah Tangga | 56.695.008 | 51.491.600 | 90,82 | 90,82 | (89,91) | 5.203.408 | 9,18 | |
| | -Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 52.240.000 | 36.320.000 | 69,53 | 69,53 | (68,83) | 15.920.000 | 30,47 | |
| | -Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 72.653.613 | 56.063.981 | 77,17 | 77,17 | (76,39) | 16.589.632 | 22,83 | |
| | -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 48.529.418 | 37.229.250 | 76,71 | 76,71 | (75,95) | 11.300.168 | 23,29 | |
| | -Fasilitasi Kunjungan Tamu | 93.040.000 | 66.250.000 | 71,21 | 71,21 | (70,49) | 26.790.000 | 28,79 | |
| | -Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 161.170.00 0 | 123.900.000 | 76,88 | 76,88 | (76,11) | 37.270.000 | 23,12 | |
| VI | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 83.565.825 | 60.962.800 | 73 | 73 | (72) | 22.603.025 | 27,05 | |
| | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 39.544.637 | 36.000.000 | 91 | 91 | (90) | 3.544.637 | 8,96 | |
| | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 44.021.188 | 24.962.800 | 57 | 57 | (56) | 19.058.388 | | |
| VI I | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 794.234.11 4 | 665.020.232 | 83,73 | 83,73 | (82,89) | 129.213.882 | 16,27 | |
| | -Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 45.020.000 | 26.100.000 | 57,97 | 57,97 | (57,39) | 18.920.000 | 42,03 | |
| | -Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 359.709.31 | 253.415.432 | 70,45 | 70,45 | (69,75) | 106.293.882 | 29,55 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--|
| | | 4 | | | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 389.504.800 | 385.504.800 | 98,97 | 98,97 | (97,98) | 4.000.000 | 1,03 | |
| VI II | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 486.736.800 | 383.828.400 | 78,86 | 78,86 | (78,07) | 102.908.400 | 21,14 | |
| | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 295.784.800 | 244.888.400 | 82,79 | 82,79 | (81,96) | 50.896.400 | 17,21 | |
| | -Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 180.952.000 | 138.940.000 | 76,78 | 76,78 | (76,01) | 42.012.000 | 23,22 | |
| | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 10.000.000 | - | - | - | - | 10.000.000 | 100,00 | |
| B | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 927.979.000 | 926.879.000,00 | 99,88 | 99,88 | (98,88) | 1.100.000 | 0,12 | |
| IX | -Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 55.325.000 | 54.325.000 | 98 | 98 | (97) | 1.000.000 | 1,81 | |
| | -Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 55.325.000 | 54.325.000 | 98,19 | 98,19 | (97,21) | 1.000.000 | 1,81 | |
| X | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | 872.654.000 | 872.554.000 | 100 | 100 | (99) | 100.000 | 0,01 | |
| | -Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang | 872.654.000 | 872.554.000 | 99,99 | 99,99 | (98,99) | 100.000 | 0,01 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--|
| | Dilimpahkan | 0 | | | | | | | |
| C | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 7.012.805.465 | 6.754.499.630 | 96 | 96 | (203) | 258.305.835 | 3,68 | |
| XI | Pemberdayaan Kelurahan | 6.818.293.465 | 6.596.043.630 | 97 | 97 | (285) | 222.249.835 | 3,26 | |
| | - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 167.972.409 | 164.780.930 | 98,10 | 98,10 | (97,12) | 3.191.479 | 1,90 | |
| | - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | 1.450.461.056 | 1.327.912.700 | 91,55 | 91,55 | (90,64) | 122.548.356 | 8,45 | |
| | - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 5.199.860.000 | 5.103.350.000 | 98,14 | 98,14 | (97,16) | 96.510.000 | 1,86 | |
| XI I | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | 194.512.000 | 158.456.000,00 | 81,46 | 81,46 | 81,46 | 36.056.000 | 18,54 | |
| | - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | 30.170.000 | 25.088.500 | 83,16 | 83,16 | (82,33) | 5.081.500 | 16,84 | |
| | - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | 164.342.000 | 133.367.500 | 81,15 | 81,15 | (80,34) | 30.974.500 | 18,85 | |
| D | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 314.808.000 | 275.105.000 | 87,39 | 87,39 | (86,51) | 39.703.000 | 12,61 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--|
| XI II | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 314.808.000 | 275.105.000,00 | 87,39 | 87,39 | (86,51) | 39.703.000 | 12,61 | |
| | - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka memantapkan | 86.523.000 | 68.895.000 | 79,63 | 79,63 | (78,83) | 17.628.000 | 20,37 | |
| | - Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya | 181.785.000 | 159.710.000 | 87,86 | 87,86 | (86,98) | 22.075.000 | 12,14 | |
| | - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | 46.500.000 | 46.500.000 | 100,00 | 100,00 | (99,00) | - | - | |

BAB IV

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka kami terus berupaya dalam meningkatkan nilai evaluasi LKjIP dengan langkah-langkah yang telah direkomendasikan oleh tim Evaluasi SAKIP dari Inspektorat Kota Serang sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan terhadap SDM di tingkat kelurahan dalam mengelola program kegiatan subkegiatan sehingga bisa akuntabel dalam merumuskan target dan capaian indikator kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian perjanjian kinerja kecamatan dan;
3. Mengoptimalkan pengaplikasian SOP pengumpulan data dalam rangka menunjang penyusunan dokumen pelaporan;
4. Melakukan perbaikan kinerja dalam reformasi birokrasi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisikan tingkat keberhasilan / kegagalan yang di cerminkan oleh hasil evaluasi dan formulasi perhitungan indikator-indikator kinerja sebagaimana yang di tunjukan dalam Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan para pembuat keputusan, sehingga keputusan yang dihasilkan mampu menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih mendalam.

5.2 PROYEKSI MASA DEPAN

Proyeksi di masa depan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Taktakan diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan pelayanan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas pelayanan aparatur melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM Kecamatan Taktakan, memantapkan fungsi kelembagaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan tersebut, beberapa langkah strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan diberlakukannya peraturan daerah Kota Serang nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Serang sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2022 perubahan peraturan daerah Kota Serang nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, diharapkan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh aparatur Kecamatan Taktakan beserta jajarannya di kelurahan secara arif dan cerdas agar pelaksanaan pelayanan dan pembangunan tidak menyimpang dari aturan yang ada.

- 2) Meningkatkan koordinasi antara institusi Kecamatan Taktakan dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.
- 3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme pelayanan serta pembangunan di Kecamatan Taktakan. Melalui program musyawarah pembangunan dari tingkat kelurahan hingga kecamatan.
- 4) Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses pelayanan dan pembangunan. Melibatkan setiap unsur masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan dan pembangunan.
- 5) Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar OPD dan OPD Kecamatan dengan Kelurahan guna mendukung terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan sinergis.
- 6) Meningkatkan pelaksanaan *standard operating procedure (SOP)* pada Kecamatan Taktakan sesuai dengan nomenklatur yang baru.
- 7) Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan. Dengan terus melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap SDM baik di kelurahan maupun kecamatan. Karena setiap pekerjaan pemerintahan telah berbasis e-government seperti system untuk perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan keuangan dan barang milik daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Taktakan kota Serang di susun, selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Serang melalui cq. Bagian Organisasi.

Sebagai akhir kata, kami beserta aparaturnya Kecamatan Taktakan mengharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 ini dapat memenuhi akuntabilitas kami kepada Stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Taktakan, Januari 2024



CAMAT TAKTAKAN

MAMAT RAHMAT, S.IP.M.Si

NIP. 19730507 199403 1 007